

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak zaman dahulu, kemiskinan sudah dirasakan nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik di darat, laut, atau udara sangat melimpah. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman, kemiskinan di tingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama di kalangan politisi dan akademis. Sebenarnya melihat data kemiskinan di Indonesia relatif mudah. Apabila indikator utama kemiskinan terkait pemenuhan kebutuhan primer, realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut (Anwas, 2014; 83) .

Di era modern saat ini, semua orang dituntut untuk maju terutama pada bidang penataan lingkungan. Masyarakat dituntut supaya sadar dengan lingkungan sekitar mereka. Karena masyarakat akan tumbuh berkembang tergantung oleh lingkungan sekitar mereka. Lingkungan yang baik atau tidaknya semua itu tergantung pada pola hidup masyarakat tersebut. Masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan bahkan tidak memperdulikannya. Banyak

masyarakat yang kurang memahami adanya sebuah konsep paradigma pembangunan yang baru bahwa masyarakat itu bukan “obyek” pembangunan melainkan “subjek” pembangunan, sehingga peran serta aktifnya sangat dibutuhkan dan diharapkan.

Lingkungan yang sehat itu merupakan salah satu kebutuhan manusia, karena lingkungan baik itu jika semua orang sadar dan memperdulikan akan kebersihan lingkungan sekitarnya. Wilayah dusun akan selalu dicirikan dengan rendahnya kualitas hidup dan permukiman yang kurang bersih. Pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya masih begitu sangat minim. Semua itu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor misalnya pendidikan yang masih rendah, minimnya modal untuk pengembangan, anggapan bahwa masyarakat dusun itu masyarakat yang miskin yang hidup dengan apa adanya. Setiap dusun mempunyai potensi, kondisi daerah dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Dalam pemberdayaan masyarakat masyarakat dusun setempat harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan tersebut, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui apa potensi dan kondisi dusunnya. Pemerintah dan lembaga yang ikut khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung adanya Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas.

Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atau inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan

ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta, dan lainnya), serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumber daya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Sesuai dengan visi Community Empowerment for Rural Development (CERD) yang dirilis oleh Departemen/ Kementrian Dalam Negeri, pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan. Sekarang saatnya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru tersebut dengan tetap diiringi dan dipantau oleh pihak terkait untuk menjaga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat sesuai yang dicanangkan sejak awal. Proses pemberdayaan masyarakat yang efisien akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab (Mardikanto, 2015; 80).

Permukiman bagian dari lingkungan hidup yang akan digunakan sebagai tempat tinggal dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi serta berhubungan dalam mewujudkan masyarakat yang tentram. Permukiman yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai penghidupan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mencapai masyarakat yang masih membutuhkan perhatian untuk mencapai masyarakat yang makmur. Upaya pemerintah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di masyarakat maka hal ini sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata empowerment mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah pengentasan kemiskinan (poverty alleviation). Istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang

selalu menjadi topik dan kata kunci istilah dari upaya pembangunan. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan berpusat pada masyarakat sehingga masyarakat berperan aktif dalam proses pemberdayaan tersebut (Hikmat dalam Alfitri, 2011: 3).

Rumah Tidak Layak Huni salah satu program kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) yang menjadi rangkaian program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Kabupaten Karanganyar yang dijalankan oleh Pemerintah di lokasi kawasan prioritas adalah Desa Kemiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1-6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan permukiman itu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan hunian juga bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan program yang diadakan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Program ini merupakan reward yang diberikan oleh pemerintah bagi desa atau kelurahan yang memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM merupakan lembaga perwakilan masyarakat dengan kepemimpinan kolektif dari tingkat kelurahan yang dibentuk sebagai wadah aspirasi masyarakat. Tujuan utama dari Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas permukiman.

Pemilihan masalah tentang Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas sebagai kajian skripsi. Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang dijadikan sebagai lokasi dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. Selain itu, Desa Kemiri dulunya merupakan daerah yang kumuh dan masih ada beberapa rumah yang tidak layak huni di kawasan Desa Kemiri tersebut. Dengan adanya Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas ini para fasilitator mulai memberdayakan masyarakat di Desa Kemiri untuk ikut berpartisipasi agar lingkungan di Desa Kemiri tertata dengan rapi agar tidak kumuh dan merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.

Dalam penelitian ini Penulis ingin mengetahui bagaimana peran fasilitator terhadap warga masyarakat dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami fasilitator dalam melaksanakan program tersebut. Program PLPBK ini pada dasarnya dibuat dalam rangka upaya pembangunan masyarakat. Program ini masih tergolong baru dan belum tentu setiap daerah bisa mendapatkan bantuan dari program PLPBK ini. Maka untuk mengetahui bagaimana peran fasilitator kepada masyarakat dalam adanya program

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kemiri yang ada di Kabupaten Karanganyar yang mendapatkan bantuan dari program PLPBK di tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendorong peran fasilitator terhadap warga masyarakat dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menganalisis apa faktor-faktor yang menghambat dan mendorong peran fasilitator terhadap warga masyarakat dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti dapat mengetahui peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pada program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pedoman kepustakaan penelitian yang relevan.
- c. Dapat menambah wawasan mengenai peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pada program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan memperoleh wawasan baru mengenai pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman mengenai peran fasilitator dalam program pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi stakeholder, dapat dijadikan rekomendasi dalam pembuatan kebijakan.